

# BAB I

## MASALAH KESENJANGAN

### A. Pengertian Kesenjangan

Kesenjangan dimaksud dalam tulisan ini adalah adanya perbedaan yang menimbulkan jurang pemisah antara kaya dan miskin yang menimbulkan terjadinya kecemburuan sosial ekonomi. Kecemburuan ini lah yang sampai saat ini masih merupakan sumber konflik yang dominan .

Kesenjangan yang dibahas antara lain:

1. Kesenjangan sosial ekonomi
2. Kesenjangan pendidikan

### B. Penyebab Kesenjangan

Salah satu penyebab kesenjangan adalah ketidakadilan. Ada sebuah adagium Latin menyatakan "*Ubi Societas Ibi Justicia*", artinya di mana ada masyarakat dan kehidupan, di sana ada hukum (keadilan). Tetapi apakah adagium ini masih relevan dengan keadaan zaman yang saat ini menghadapi kesemrawutan, kacau balau, dan berantakan, itulah yang menjadi pertanyaannya. Keadilan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, berkuasa, "beruang" dan tentu saja yang menggunakan dalih demi keadilan, demi keamanan, demi keutuhan dan masih banyak lagi dalih digunakan untuk kepentingan pribadi.

Didunia hukum juga ada sebuah adagium yang menyatakan bahwa keadilan tak mungkin dirasakan sama oleh semua orang. Adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Akan tetapi, jika menilai tentang adil atau tidakadilankah kondisi di Indonesia saat ini, tampaknya orang bisa sejenisak menepikan adagium tersebut.<sup>1</sup>

Menyoroti ketidakkeadilan yang saat ini hidup di masyarakat, hasil jajak pendapat yang diambil dari Kompas mengungkapkan berbagai ketidakadilan yang masih dirasakan oleh sebagian besar warga. Situasi keterpurukan ekonomi, politik dan hukum, serta berbagai masalah sosial pasca reformasi pada akhirnya harus dibayar oleh masyarakat luas dalam wujud beban yang harus disangga dalam kehidupan keseharian mereka.<sup>2</sup>

Ungkapan ketidakadilan yang paling menonjol terekam dari segi penegakan hukum. Pemberian sanksi kepada para pejabat, mantan pejabat maupun konglomerat misalnya, tidak ada satu pun yang mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Bobot sanksi hukum yang ringan sering kali masih diperburuk dengan tidak dijalankannya vonis hakim secara konsisten. Tidak seragamnya penerapan sanksi hukum bagi seluruh lapisan masyarakat yang sedemikian dianggap sebagai ketidakadilan oleh 87,6 persen responden tidak sebanding dengan responden yang menjawab bahwa sudah tercipta keadilan sebanyak 9,7%.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Toto Suryaningtyas, "Rintihan Negeri Sarat Ketidakadilan", Kompas, 15 Sep 2002, h. 32

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

Rasa skeptis publik semakin meningkat setelah mereka belajar dari pengalaman yang menunjukkan bahwa untuk skala seperti kerusuhan Mei 1998 yang demikian dahsyatpun masih banyak terjadi imunitas tuntutan hukum. Sementara untuk seorang buruh kecil, perkara mencuri sandal berlubang pun cukup menjadikan dia sebagai narapidana.

Dari keseluruhan ketidakadilan biang keladi utama ditimpakan kepada aparat yang tergambar oleh tudingan 65 persen responden. Dugaan sementara pihak bahwa sistem hukum Indonesialah yang paling berperan sebagai sumber kebobrokan, dalam kenyataannya hanya disetujui oleh 23 persen responden.<sup>4</sup>

Dalam segi ekonomi, beratnya beban sosial akibat kelangkaan lapangan kerja menjadi masalah utama yang disorot publik. Kesulitan ekonomi serta ketimpangan sosial yang terjadi akibat kesempatan memperoleh kerja, menjadi tumpuan nada minor masyarakat. Hampir seluruh responden menilai kondisi demikian sebagai suatu ketidakadilan yang nyata dialami saat ini.

Senada dengan itu, kesempatan memperoleh penghasilan yang layak juga dirasakan sangat timpang. Di tengah triliunan dana bantuan pencairan bank Indonesia yang dituangkankan untuk menalangi utang beberapa ratus konglomerat, perhatian pemerintah terhadap puluhan juta penganggur dipandang masih sangat minim.

Masalah tidak berhenti sampai di situ. Pada saat orang sudah bekerja, kesempatan untuk memperoleh penghasilan yang layak, juga belum tentu tercapai.

---

<sup>4</sup> Ibid.

Kasus-kasus pekerja anak di Jermal, bayaran buruh dibawah UMR, serta nasib para tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal baru-baru ini, membuktikan beratnya upaya masyarakat untuk dapat hidup layak. Ironisnya dari berbagai kasus itu dapat dilihat lambannya perhatian pemerintah dalam memberikan bantuan.<sup>5</sup>

Untuk memperoleh gambaran lebih konkrit, dibawah ini ada beberapa pendapat yang dimuat di harian Kompas tentang Keadilan.

Keadilan bukan hanya persoalan ketuk palu di pengadilan. Persoalan diskriminasi perlakuan, hingga peluang yang adil untuk memperoleh sesuatu masih menjadi buah keluhan masyarakat. Keadilan itu kan harus ada uangnya. Kalau tidak ya harus punya kuasa. Anak saya yang masih SMP itu dibebani dengan segala macam sumbangan-sumbangan, terutama saat pengambilan raport. Tapi, ada anak pejabat Depdiknas disekolahnya yang malah bebas uang SPP, dan juga tidak kena uang iuran-iuran wajib lain. Pada hal, masih ada anak lain yang susah untuk membayar ini itu. Yah, memang masih ada yang dapat keringanan. Tapi, anak pejabat Depdiknas itu bukan termasuk mereka yang tidak mampu itu toh?

SUWARNO

Karyawan swasta di Surabaya.<sup>6</sup>

Saya dulu pernah ditolak masuk ke sebuah perusahaan karena saya membawa hepatitis B. Ternyata menurut dokter penderita hepatitis B itu masih mampu bekerja sampai bertahun-tahun. Di Amerika saja orang yang sakit AIDS masih boleh bekerja. Malah dilindungi hukum. Tapi, di sini ada saja perusahaan yang standart kesehatannya tinggi banget. Padahal, Indonesia kan negara berkembang. Wajar kalau masih banyak penyakit. Ini bentuk KETIDAK ADILAN yang saya alami. Istri saya saja bisa menerima saya kok, mengapa perusahaan tidak mau terima?

DODO

Karyawan swasta di Jakarta<sup>7</sup>

Paling tidak menyenangkan itu kalau mengngurus KTP. Pasti diminta surat KI, itu surat bukti kewarganegaraan Indonesia khusus untuk Jakarta. Kemarin mengngurus pasport juga begitu. Tetapi saya diminta SKBRI.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> "Bukan Cuma di Pengadilan", Kompas, 15 Sep 2002, h. 32

<sup>7</sup> Ibid.

Sebagai orang Cina saya selalu dikira orang kaya, saya tidak dapat peluang yang ADIL. Waktu kuliah pernah nyoba minta bea siswa.

HENDI<sup>8</sup>

Mahasiswa di Jakarta

Selama ini semuanya itu terpusat di Jakarta. Sementara di daerah cuma dimanfaatkan kekayaan alamnya saja. Orang di daerah jadinya semua berorientasi ke Jawa. Saya sendiri nanti lulus sekolah rencananya mau coba jadi penyanyi. Di sini fasilitasnya serba engga ada. Jadi, mungkin nanti saya akan ikut saudara ke Jawa. Tapi, ya itu belum menjamin juga sih. Karena katanya kalau pendatang dari daerah itu kesempatannya untuk jadi terkenal lebih susah?"

DEVI<sup>9</sup>

Pelajar SMU di Samarinda

Itulah hasil jajak pendapat yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas 11-12 September 2002. Sebanyak 864 responden berusia 17 tahun dipilih secara acak menggunakan *systematic sampling method*. Responden berdomisili di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Samarinda, Makassar, dan Manado.

### C. Kesenjangan sosial dan Ekonomi

Negara Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan terbagi dalam beberapa propinsi menjadikan negara Indonesia memiliki berbagai macam etnis, berbagai macam tingkat sosial dan ekonomi, berbagai macam bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh etnis yang satu dengan etnis yang lain, dan memiliki beragam budaya sehingga dapat menimbulkan kesulitan berinteraksi dengan etnis

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

yang berbeda dan interaksi dengan orang dari tingkat ekonomi yang berbeda, yang akhirnya dapat memicu konflik.

Dari fakta yang tidak bisa dibantah, negara ini sangat rentan terhadap konflik. Salah satu penyebabnya adalah adanya ketidakadilan yang menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi. Yang pertama adalah adanya ketidakadilan dalam pembagian sumber daya alam, misalnya Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, antara lain: hasil hutan, hasil tambang (minyak, gas alam, batu bara), hasil laut, dan tanah yang subur. Sumber daya alam tersebut hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang mempunyai hubungan baik dengan penguasa dan penguasa pun tidak mampu mengelolanya dengan benar dan adil sehingga menimbulkan kesenjangan.

Ketidakadilan yang kedua adalah ketimpangan informasi, misalnya informasi hanya dapat dijangkau oleh orang-orang tertentu yang memiliki koneksitas, di mana mereka memiliki peralatan yang tidak terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, antara lain internet<sup>10</sup>. Sehingga kebenaran dan keadilan tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan mengakibatkan terjadinya kesenjangan. Penduduk yang tidak mampu memiliki telepon, media elektronik, dan media cetak tidak akan mampu untuk mengetahui informasi mengenai keadaan ekonomi Indonesia yang sesungguhnya, gejala-gejala sosial yang sedang

---

<sup>10</sup> Yudo Poerwowidagdo, "Mengantisipasi Konflik Dalam Masyarakat", Suara Pembaruan, 7 Feb 2003, h. 8

melanda, masalah-masalah dalam dunia pendidikan, dan peristiwa-peristiwa budaya yang ada di masyarakat.

Ketidakadilan yang ketiga adalah diskriminasi antar etnis yang semakin tajam. Diskriminasi antar etnis sering juga menyebabkan terjadinya ketidakbenaran dan ketidakadilan, misalnya profesi tertentu dikuasai oleh etnis tertentu, seperti perdagangan komoditi tertentu dikuasai oleh etnis tertentu, demikian juga dengan jabatan tertentu yang dikuasai oleh orang dari etnis tertentu, sehingga kebenaran dan keadilan sulit dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Ketidakadilan seperti yang telah dijelaskan di atas yang dapat mengakibatkan kesenjangan yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya konflik.

Bagi masyarakat yang hidup di perkotaan tentu saja hal ini terlihat dengan jelas, yaitu antara si kaya dan si miskin, mereka yang hidup di daerah elite yang hanya dapat dijangkau oleh orang tertentu dan mereka yang hidup di daerah slum, di mana sanitasi dan infrastruktur sangat buruk, bahkan untuk mendapatkan sesuap nasi bagi dirinya saja sudah sulit apalagi bagi keluarganya.

Kelihatannya dari banyak kasus kerusuhan-kerusuhan perkotaan yang telah terjadi kasus kesenjangan dan kecemburuan sosial ekonomi cukup menonjol menjadi prakondisi timbulnya gejolak kekerasan sampai kerusuhan perkotaan.<sup>11</sup> Dari sekian banyak komentar mengenai sebab terjadinya kekerasan di

---

<sup>11</sup> Herlianto, "Pelayanan Perkotaan". Bandung: Yabina . 6 Juni 1998. h. 83

kota-kota itu, kelihatannya Amien Rais, ketua PP Muhammadiyah, adalah tokoh vokal yang menyebut kesenjangan sosial ekonomi sebagai penyebab utama.<sup>12</sup>

Masalah kesenjangan demikian menonjol, bila kita melihat beberapa kasus kerusuhan buruh di Medan kasus kesenjangan itu tak dapat dipungkiri, soalnya dibalik pembanguna kota Medan yang menggebu-gebu para buruh merasakan bahwa kehidupan sosial ekonomi mereka tetap tidak meningkat, itulah sebabnya para buruh itu kemudian melakukan demonstrasi menuntut perbaikan nasib mereka dan mengajukan hal itu pada para pejabat termasuk Menaker yang kala itu berada di Medan. Kelihannya kondisi kesenjangan itu sudah demikian besar sehingga ketika massa berkumpul dan tuntutan mereka seakan-akan tidak diperdulikan, maka mereka berusaha dengan cara mereka sendiri untuk mengurangi kesenjangan itu dengan turun ke jalan.<sup>13</sup>

Tentu saja masih banyak hal yang dapat mengakibatkan terjadinya kesenjangan yang sangat sensitif untuk dibahas, misalnya ketidakbenaran dan ketidakadilan dalam hukum, agama, dan politik yang dalam hal ini tidak dibahas dalam tulisan ini.

Kesenjangan ekonomi di negeri ini masih sangat lebar. Di satu pihak terdapat warga yang untuk makan sehari-hari saja masih sangat sulit, sementara dipihak lain terdapat warga yang bergelimang harta, sehingga untuk memuaskan hobinya pun mereka bingung mau berbuat apa.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid., h. 83

<sup>13</sup> Ibid., h. 84

<sup>14</sup> Aje Toenlio, "Sekolah dan Kesenjangan Ekonomi", Suara Pembaruan, 17 Sep 2002, h. 9

Memang kekayaan sementara warga negeri ini adalah kekayaan semu, karena secara makro Indonesia ini memiliki utang luar negeri luar biasa besarnya. Meskipun demikian, tetap saja tidak dapat dipertanggung jawabkan secara moral, kalau utang yang besar itu dinikmati secara tidak adil hanya oleh sebagian warga. Bukankah setiap warga negara ikut memikul utang itu? Pranata ekonomi jelas memiliki andil paling besar terhadap adanya kesenjangan ekonomi amat parah, namun pranata lainpun ikut ambil didalamnya, karena kebijakan yang seringkali diskrimatif.

Memasuki Millenium III, yaitu masa globalisasi sangat berpengaruh, karena peristiwa yang terjadi di berbagai negeri, baik keadaan sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum dan peristiwa-peristiwa lain akan dengan cepat berdampak pada negara lain karena sistem komunikasi yang lebih canggih, jaringan internet yang dapat memberikan informasi begitu cepat, bahkan perang yang terjadi antara Irak dan Amerika dapat dipantau secara langsung di beberapa pelosok dunia, demikian pula peristiwa yang terjadi di negeri ini pun dapat dipantau langsung oleh negara lain. Tentu saja dampak sosial ekonomi baik internal ataupun eksternal begitu cepat menyesuaikan.

#### **D. Kesenjangan Pendidikan**

Masalah pendidikan adalah masalah yang sangat serius di Indonesia, karena dari segi kualitas atau mutu pendidikan terdapat perbedaan besar antara di perkotaan dan di pedesaan, khususnya pada tingkat pendidikan dasar. Kualitas

pendidikan di pedesaan sangat jauh tertinggal, antara lain dalam hal sarana pendidikan dan tenaga pengajar. Demikian juga di perkotaan, meskipun ada sekolah yang sudah memiliki sarana pendidikan dan tenaga pengajar yang memadai, tetapi masih banyak juga sekolah-sekolah yang memiliki sarana pendidikan dan tenaga pengajar yang sangat minim, terutama di daerah pinggir kesenjangan begitu nyata terlihat.

Kesenjangan pendidikan sangat terkait dengan kesenjangan ekonomi, kesulitan ekonomi rumah tangga membuat kesulitan mendapatkan pendidikan . Kesenjangan ekonomi di negeri ini masih sangat lebar. Di satu pihak terdapat sementara warga yang untuk makan sehari-hari saja masih sangat sulit, sementara di pihak lain terdapat warga negara yang bergelimang harta. Dalam konteks persoalan pendidikan, di satu pihak terdapat banyak bangunan sekolah yang minim fasilitas dan nyaris rubuh, sementara dipihak lain terdapat warga yang amat mudah bolak balik mengganti mobil berharga ratusan juta hingga milyaran rupiah. Padahal biaya perbaikan puluhan sekolah tidak seberapa bila dibandingkan dengan harga sebuah mobil mewah.

Pranata ekonomi jelas memiliki andil paling besar terhadap adanya kesenjangan ekonomi yang amat parah, namun pranata lainpun ikut andil didalamnya, karena kebijakan pendidikan yang masih diskriminatif. Andil pendidikan dalam menciptakan ketidakadilan ekonomi di indonesia masih amat bervariasi, sementara dipihak lain sekolah-sekolah bermutu hanya dimasuki oleh mereka dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Bahkan untuk mengejar

pendidikan bermutu, kalangan ekonomi atas tidak segan-segan mengirimkan anaknya untuk mengikuti pendidikan sejak dini di luar negeri.

Dari kacamata pendidikan, kelompok ekonomi lemah sulit mempersempit kesenjangan ekonominya dengan kelompok ekonomi menengah keatas, karena kelompok ekonomi lemah sulit memperoleh pendidikan bermutu.

Kesenjangan pendidikan di Indonesia sesungguhnya merupakan warisan kolonial.<sup>15</sup> Pada masa penjajahan Belanda, demi kepentingan penjajah, warga diadu domba dan dibodohi melalui berbagai bentuk diskriminasi pendidikan . Dalam hal pendidikan dasar misalnya, bagi golongan bangsawan dan Timur Asing disediakan sekolah istimewa dengan lama pendidikan tujuh tahun, sedangkan untuk rakyat biasa disediakan sekolah seadanya dengan lama pendidikan dua tahun. Diskriminasi ini menjadi sempurna dalam menciptakan kesenjangan ekonomi, karena pemerintah kolonial juga menjadikan kaum Timur Asing sebagai tangan kanan bidang ekonomi.

Setelah merdeka, secara formal diskriminasi tersebut memang dihapus, sebagai mana dapat dibaca pada pembukaan dan batang tubuh Undang Undang Dasar 1945. Tetapi dalam kenyataannya, perpaduan antara telah mengakarnya sistem yang dikembangkan pemerintah kolonial di satu pihak, serta ketidak mampuan pemerintah dalam menciptakan sistem yang lebih adil di pihak lain, membuat praktek pendidikan yang diskriminatif itu tetap langgeng.

---

<sup>15</sup> Ibid.

Kenyataan historis dan dampaknya hingga kini, sebagaimana dikemukakan di atas mesti disadari benar oleh setiap orang. Sekolah merupakan lembaga yang dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk maksud penyadaran tersebut. Melalui pelajaran sejarah misalnya, sekolah mengajarkan apa adanya kenyataan pahit diskriminasi sosial masa kolonial, agar setiap warga menyadari posisinya dalam konteks sejarah, dan dengan demikian lebih bijak dalam menempatkan diri. Agar mereka yang sedang berjaya saat ini karena diuntungkan oleh diskriminasi sosial waktu lalu, tidak lupa diri dan menikmati sendiri sepuas-puasnya kejayaannya sekarang, tanpa menghiraukan sesama saudaranya sebangsa yang kurang beruntung. Dipihak lain, agar mereka yang kurang beruntung karena diskriminasi sosial waktu lalu tidak hanya menyesali diri dan menerima ketidak beruntungannya secara negatif, melainkan termotifasi untuk bangkit dari keteringgalannya dengan memanfaatkan secara maksimal setiap peluang yang telah ada dan mungkin diadakan pemerintah.

Pendidikan sampai saat ini masih merupakan kemewahan, karena tidak dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, apalagi jika menghendaki pendidikan yang berkualitas tentu saja harus mengeluarkan biaya tambahan yang tidak kecil.

Pendidikan sangat dipengaruhi oleh biaya pendidikan yang terdapat keterkaitan dengan kualitas tenaga pengajar, fasilitas atau sarana pendidikan, prestasi siswa dan sistem pendidikan. Yang tidak punya uang jangan

mengharapkan mendapat sekolah berkualitas dan sebagai akibatnya terjadilah kesenjangan yang dapat memicu konflik.

Mungkin terlalu sering mendengar sekolah yang rusak parah, bahkan roboh disaat ada kegiatan belajar, sehingga apabila mendengar ada sekolah yang rusak, tidak layak pakai dan roboh kita acuh tak acuh dan menganggap masalah biasa. Kepekaan terhadap situasi saat ini yang begitu memprihatinkan sudah lenyap. Kepedulian terhadap sesama menderita dan terancam karena gedung sekolah yang hampir roboh dianggap bukan tanggung jawab kita, tetapi tanggung jawab orangtuanya, tanggung jawab pemerintah.

Sekolah Kristen didirikan namun bukan untuk mereka yang berkekurangan, tetapi bagi mereka yang berduit, mereka yang mampu membayar uang sekolah dan uang pembangunan yang diluar jangkauan si miskin. Untuk membiayai hidup sehari-hari saja sulit, apalagi untuk membayar uang sekolah.

Ada beberapa kisah kehidupan yang diangkat dari harian Kompas 4 Mei 2003:

Hendra Sujana (25), mahasiswa semester VIII Jurusan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan seni Universitas Negeri Yogyakarta (UNY-dulu bernama IKIP Yogyakarta), pagi hari pukul 09.00 baru saja pulang ke tempat kost usai kuliah pagi. Ia segera ganti pakaian lusuh dan topi butut. Ia siapkan sepeda ontelnya, dan dengan segera “bermetamorposa”lah Hendra si mahasiswa menjadi Hendra sebagai si pemulung. Hendra, yang kos di kawasan Kalimalang, dengan sepeda ontelnya, sehari-hari menyusuri jalan-jalan di Yogyakarta untuk mengais barang-barang bekas, barang-barang rongsokan. “Biar butut, sepeda ini bisa mengangkut barang hingga dua kwintal,” ucap Hendra mengenai sepedanya. Dengan itulah ia melakukan pekerjaannya. Setiap pagi, sejak pukul 05.00, dia menyusuri jalan Solo, jalan Kaliurang, dan terminal Jombor untuk mencari-cari barang bekas. Pada jam-jam itulah katanya para pemilik toko membuang sampah seperti kardus, botol dan plastik. “ Saya sering menunggu mereka buang barang. Kalau tidak begitu, nanti diserobot pemulung lain.

Hendra bukan satu-satunya mahasiswa yang mengisi kesehariannya dengan kesibukan seperti itu. Ari Sulisty Pratiwi (20), panggilannya Sulis, mahasiswi semester VI Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia (UII), pastilah tidak sempat bermalam minggu di kafe-kafe, atau bercengkrama di teras rumah dengan pacar yang “apel”. Kalau Sabtu-Minggu, cucian malah numpuk”, katanya. Sulis memang membuka usaha cucian alias *laundry*. Pelanggannya kebanyakan sesama mahasiswa yang kos disekitar daerah Babarsari, depan jalan Solo, dan Yogyakarta. Di Yogyakarta ada Hendra, Sulis, juga Bunyamin (22), mahasiswa semester VI Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni UNY, yang sehari-hari menggelar dagangannya berupa buku-buku di emper-emper toko atau di tempat-tempat seminar.

Ina Tarsina (19) mahasiswi semester II jurusan Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Perikanan Institut pertanian Bogor (IPB). Mahasiswi yang tinggal di gedung A3 asrama IPB ini bersama teman sekamarnya, Nispi, Lailatni (19), di antara teman-teman se-asrama dikenal sebagai penjual gorengan. Kalau para penghuni asrama putri itu ingin gorengan, kepada merekalah para mahasiswi itu berpaling, atau juga pada mahasiswi lain yang punya usaha serupa, yakni Dela dan Sri.

Hendra, Sulis, Bunyamin dan Ina Tarsina, bisa dikatakan masih beruntung, masih dapat menikmati sekolah di perguruan tinggi walaupun dengan jerih, payah dan perjuangan yang gigih. Bagi mereka yang hidup di pedesaan, jangankan perguruan tinggi, untuk menempuh sekolah dasar saja dengan membayar Rp 1.000,00 /bulan banyak yang harus menunggak, karena sulitnya untuk mencari biaya hidup.<sup>16</sup>

Dalam hubungan ini kiranya jelas bahwa kesempatan untuk dapat mengikuti pendidikan sehingga dapat memiliki ijazah itu, sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh kemampuan ekonomi, karena proses mengikuti pendidikan itu sendiri menuntut biaya. Jikalau pendidikan itu kemudian ternyata telah menjadi “komoditas” yang mahal, maka dengan sendirinya pendidikan itu lalu hanya terbeli oleh mereka yang kemampuan ekonomisnya kuat. Akibatnya terjadilah apa yang disebut “lingkaran setan” sebab akibat kemiskinan yang tak habis-habisnya. Mereka yang miskin tidak mampu memperoleh pendidikan yang diperlukan;

---

<sup>16</sup> Ibid., h. 13

tanpa pendidikan yang memadai tidak dapat memperoleh pekerjaan yang memadai pula dan tanpa pekerjaan yang memadai, tidak mungkin meraih taraf kemampuan ekonomi yang mencukupi alias menjadi miskin -dan karena miskin tidak dapat mengikuti pendidikan- dan seterusnya. Dalam hal ini kesempatan dan kemampuan untuk mendapat pendidikan, apalagi pendidikan yang baik, sebagai alat untuk mencapai taraf kemampuan ekonomi yang baik pula, lalu hanya menjadi monopoli sekelompok kecil masyarakat yang mampu. Akibatnya, mayoritas penduduk yang miskin akan tetap saja selalu miskin, sedang minoritas penduduk yang kaya akan tetap menjadi kaya atau bahkan semakin kaya.

Dalam hal inilah persoalan etis menyangkut keadilan sosial atau pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan menjadi sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian yang serius. Dalam kaitan itu, amatlah perlu untuk mengupayakan agar dengan sungguh-sungguh mematahkan mata rantai lingkaran setan serta kemiskinan yang telah disinggung di atas.

Biaya pendidikan yang terlalu mahal, terutama sekolah swasta yang favorit, juga menjadi andil bagi terciptanya kesenjangan. Masuk TK saja memerlukan jutaan rupiah, apalagi SD, SLTP, SLTA dan perguruan tinggi, memerlukan puluhan juta. Memang bagi kelas ekonomi tertentu dapat dianggap tidak mahal, tetapi bagi kebanyakan orang di negeri ini tentu saja sangat memberatkan.

Berikut ini jajak pendapat Kompas mengenai biaya pendidikan khususnya perguruan tinggi negeri. 64 % dari 940 responden beranggapan bahwa masuk

perguruan tinggi saat ini demikian mahal, sedangkan 71 % responden beranggapan pemerintah selama ini tidak cukup tanggap terhadap masalah yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat. 71 % responden mengatakan jika perguruan tinggi negeri mencari sendiri sumber pendanaannya, maka bisa terjadi penyimpangan tujuan perguruan tinggi negeri sebagai lembaga pendidikan. 69 % responden beranggapan bahwa lembaga-lembaga pendidikan saat ini lebih berorientasi mencari keuntungan. 56 % responden menyatakan ketidak yakinan pada upaya perguruan tinggi negeri dalam mencari profit bisa menghasilkan lulusan atau sarjana yang bisa berbobot<sup>17</sup>.

Untuk membela dan membenarkan kenyataan bahwa hanya kelompok kecil yang mampu saja yang dapat menikmati pendidikan yang baik dan tinggi, sering kita mendengar alasan-alasan berikut. Alasan yang paling awal ialah bahwa pendidikan itu memerlukan biaya. Semakin baik mutu pendidikan yang diselenggarakan, semakin mahal pula biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karenanya, wajar dan sah-sah saja bahwa harga pendidikan juga mahal. Oleh sebab itu, jikalau kenyataannya seperti itu lalu hanya mereka yang kuat ekonominya saja yang dapat memperoleh pendidikan yang bermutu, itu juga wajar dan sah-sah saja. Apa boleh buat mereka yang tidak mampu membayar atau kurang mampu membayar biaya pendidikan terpaksa tidak dilayani. Alasan yang kedua adalah kemampuan pemerintah Indonesia dalam membiayai pendidikan masih sangat terbatas dan rendah, bahkan untuk sekolah-sekolah dan perguruan

---

<sup>17</sup> "Terjalnya Biaya Pendidikan ke Perguruan Tinggi", Kompas, 22 Juni 2003, h. 16

tinggi pemerintah itu sendiri. Oleh sebab itu, kita jangan mengharapkan bantuan pendidikan dari pemerintah. Kalau bukan dari pemerintah, maka sumbernya dari masyarakat atau “konsumen” pendidikan sendiri. Hal itu berarti konsumenlah yang harus membayar biaya tinggi tersebut. Alasan yang terakhir ialah kita harus menyadari bahwa tidak setiap orang harus dan bisa mencapai pendidikan dan tingkat pendidikan yang tinggi. Oleh Sebab itu, logis bahwa dikatakan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin kecil pula jumlah mereka yang sungguh-sungguh memerlukan dan mampu memperoleh pendidikan tersebut.

Selanjutnya marilah kita menghadapi kesenjangan secara realistis, sambil menentukan metode penyelesaian yang sesuai dengan fakta, beberapa pandangan secara realistis menanggulangnya, mengurangi, memperkecil bahaya konflik dan lebih jauh lagi, agar tantangan ini bisa dijadikan peluang bagi pelayanan perkotaan.